

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Peran dan kontribusi Pemerintah Nagari diperlukan dalam pengelolaan BUMNag. Adapun bentuk kontribusi pemerintah nagari ialah: 1) pembuatan pernag terkait pengelolaan BUMNag oleh pemerintah nagari, agar pengurus dapat bekerja dengan baik, 2) ikut serta dalam musyawarah nagari, yang mana musyawarah nagari merupakan forum tertinggi dalam pengelolaan BUMNag, 3) bersama-sama mengelola asset nagari 4) Pemerintah Nagari mengawasi dan mengontrol jalannya BUMNag, dan 5) ikut serta dalam rapat laporan tutup buku BUMNag.

Mengingat kepemilikan BUMNag yang dimiliki oleh nagari, dengan mayoritas kepemilikan pemerintahan nagari, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah nagari rutin menganggarkan penyertaan modal untuk BUMNag. Penyertaan modal bersumber dari dana desa, yang kemudian dianggarkan untuk prioritas penggunaan dana desa, salah satunya ialah untuk pengembangan Badan Usaha Milik Nagari. Kemudian sebagai upaya agar tidak terjadi kepailitan, keuntungan yang didapat dari pengembangan modal, akan dialokasikan dengan tepat. Keuntungan yang diperoleh tidak untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu, melainkan dialokasikan sebagaimana yang tertuang dalam AD/ART, diantaranya adalah: 1) 35% untuk cadangan usaha BUMNag, 2) 25% untuk pendapatan asli nagari, 3) 30% untuk

Pengurus BUMNag dan karyawan, 4) 10% untuk pendidikan, pembinaan, pelatihan, kesehatan, dan sosial.

Sementara itu, upaya yang dapat dilakukan pemerintah nagari untuk meningkatkan kapasitas pengurus BUMNag adalah, Mengadakan pelatihan terkait bidang usaha untuk pengurus BUMNag, mengadakan pelatihan team building, dan mengadakan studi komparatif pada BUMNag lain yang sudah berhasil.

4.2 Saran

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan terkait Dukungan Pemerintah Nagari Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari, sejauh ini peneliti melihat keberhasilan dalam pengelolaan BUMNag. Hadirnya pemerintah nagari memberikan dorongan untuk mempertahankan keberadaan BUMNag, dan mengajak masyarakat agar sama-sama peduli terhadap apa yang dikelola. Sebagai tambahan peneliti ingin memberi saran, dan diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan BUMNag lebih dari yang sebelumnya:

1. Modal sosial yang dibangun disarankan tidak hanya sekedar antara pemerintah nagari, pengurus, dan masyarakat yang ruang lingkupnya masih di sekitar Nagari Simpang Sugiran, tetapi lebih menjangkau ke berbagai daerah atau bahkan sampai ke kancah nasional.
2. Terkait dengan permodalan, BUMNag di Simpang Sugiran diharapkan tidak hanya terpaku pada modal dari Pemerintah Nagari Saja, tetapi dapat menjalin

kerjasama atau menghadirkan investor agar pengembangan BUMNag dapat memperoleh hasil yang lebih besar.

